

L

K

I

P



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016**

NOMOR : 800/636/I-BKPSDM/2017
TANGGAL : 31 JANUARI 2017



HANTARAN KATA

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas bimbingan, pertolongan, serta kemudahan dari-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 ini disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan pelaporan kinerja untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 dalam rangka mewujudkan visi-misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga sebagai media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 ini dapat memberikan masukan bagi peningkatan kinerja, pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang.

Bukittinggi, 31 Januari 2017

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI**



H. YOLLIS ANDRI, S.Pd, M.Pd
Nip.19580909 198103 1005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan kinerja tahunan instansi pemerintah yang memuat pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKIP SKPD) disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Tahunan SKPD dan Rancangan Awal RKPD serta berpedoman pada Renstra SKPD.

Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian Daerah (LKIP BKD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi melalui tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016. Dengan maksud dan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi, serta salah satu upaya dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2016 telah menetapkan 9 (lima) program dan melaksanakan 58 (empat puluh delapan) kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Kota Bukittinggi,

untuk mendukung 4 (empat) tujuan dan 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan perjanjian kinerja, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

Tabel - i

**Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)			
			Sangat Baik (100%)	Baik (80% ^{s/d} <100%)	Cukup (60% ^{s/d} <80%)	Kurang (<60%)
1	Penataan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	Tertatanya manajemen penyelenggaraan pemerintahan		85,42%		
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	100%			
3	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Diklat			68,50%	
4	Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi	Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Standar Kompetensi	131,03%			
5	Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Dikelola dengan Sistem Otomatisasi	106,60%			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)			
			Sangat Baik (100%)	Baik (80% <i>s/d</i> <100%)	Cukup (60% <i>s/d</i> <80%)	Kurang (<60%)
6	Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward			71,46%	
7	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	100%			

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pencapaian target dari rencana kinerja (*performance plan*) sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

- ✓ Tercapai dengan predikat **"Sangat Baik"** sebanyak 4 (empat) sasaran strategis, yaitu :
 1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD, dengan capaian 100%,
 2. Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi, dengan capaian kinerja sebesar 131,03%,
 3. Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian, capaian kinerja sebesar 106,60%,
 4. Peningkatan Disiplin Aparatur, capaian kinerja sebesar 100%.
- ✓ Tercapai dengan predikat **"Baik"** yaitu pada sasaran strategis : Penataan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien, dengan capaian kinerja mencapai 85,42%,
- ✓ Tercapai dengan predikat **"Cukup"** yaitu pada sasaran strategis : Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur, dengan capaian kinerja sebesar 68,5%,
- ✓ Sedangkan predik predikat **"Kurang"**, tidak ada.

Berdasarkan hasil pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2016 masuk dalam kategori baik.



DAFTAR ISI

	Hal.
HANTARAN KATA	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi	4
➤ Visi dan Misi	5
➤ Tugas Pokok dan Fungsi	5
➤ Struktur Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja	15
B. Analisis Pencapaian Kinerja	16
C. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) merupakan tekad Pemerintah untuk terus diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Salah satu prinsipnya adalah Akuntabilitas, yaitu pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 ini merupakan upaya untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun sasaran dalam penyusunan LKIP ini adalah kegiatan strategis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah Kota Bukittinggi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015.
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III Serta Rincian Tugas Eselon IV Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi;
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam satu tahun anggaran.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan LKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 adalah :

1. Perwujudan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan, penghematan, peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi dalam mencapai visi dan misi organisasi yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi.
4. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perencanaan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

D. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi sebagai suatu lembaga pemerintahan daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah dibidang Kepegawaian Daerah terbentuk pada awal era otonomi daerah pada tahun 2001. Dasar hukum yang melandasi pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

Seiring perkembangan dan kebutuhan daerah, maka pada tahun 2008 telah dilakukan peninjauan, penggantian dan penyesuaian kembali dengan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kota Bukittinggi. Untuk selanjutnya diterbitkanlah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, dimana pada Bab V Perda tersebut telah disebutkan tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi.

➤ **Visi dan Misi**

Berangkat dari perkembangan pembangunan yang menuntut semakin berkualitasnya SDM aparatur pemerintah serta untuk menunjang pencapaian visi Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi yang Professional dan Sejahtera”

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna mewujudkan Visi tersebut adalah dengan menetapkan Misi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur,
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian,
4. Meningkatkan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi pada Bab V Pasal 12 menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka pada Pasal 13 diuraikan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai norma dan

standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan,
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana tertuang pada Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 yang terdiri dari ;

1. Kepala Badan

Tugas Pokok dan fungsi kepala Badan adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.

2. Bagian Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi perangkat daerah serta lingkup Badan Kepegawaian Daerah yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perencanaan dan program, pelayanan proses kepegawaian, evaluasi pengendalian program, pelaporan dan kehumasan. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pengembangan Karir

Bidang Pengembangan karir ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan sebagian urusan wajib yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang pengembangan karir. Bidang pengembangan karir ini membawahi :

- Sub Bidang Mutasi
- Sub Bidang Bina Disiplin

4. Bidang Diklat

Bidang Pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan. Bidang diklat ini membawahi :

- Sub Bidang Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan
- Sub Bidang Program dan Evaluasi

5. Bidang Pengadaan, pemberhentian dan Pensiun

Bidang pengadaan, pemberhentian dan pensiun mempunyai tugas menyelenggarakan program pengadaan, pemberhentian dan pensiun dalam arti merencanakan dan melaksanakan penetapan formasi, pengumpulan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan jumlah dan jenis pegawai yang dibutuhkan, pelaksanaan penerimaan, pengujian dan persiapan pengangkatan CPNSD serta pengumpulan bahan dan memproses pensiun PNS. Bidang ini membawahi :

- Sub Bidang Pengadaan Pegawai
- Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun

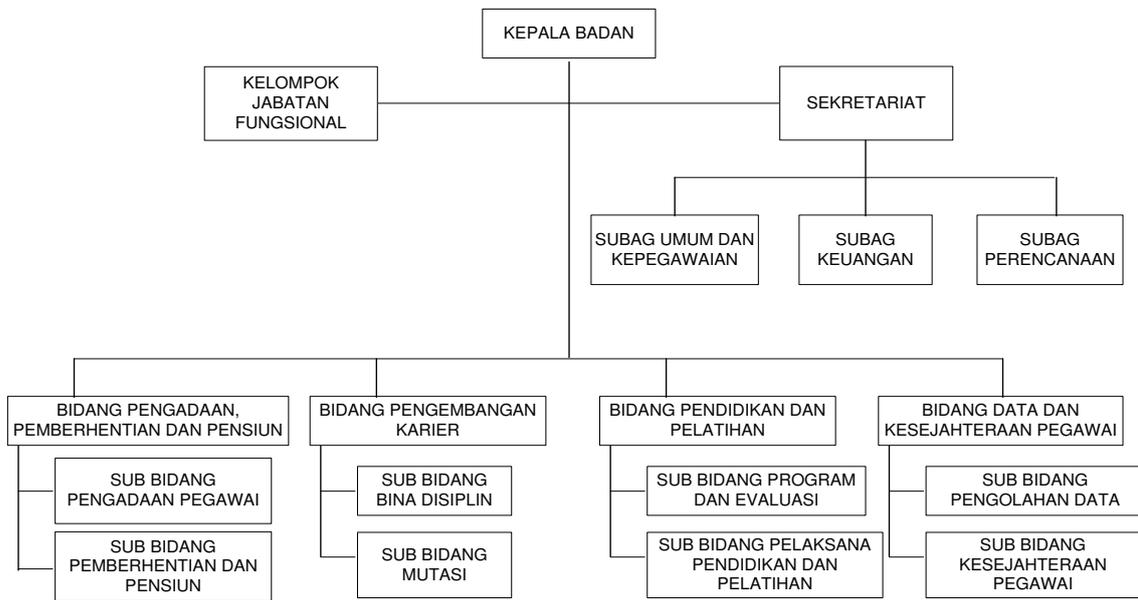
6. Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang data dan kesejahteraan pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang data dan kesejahteraan PNS. Bidang ini membawahi:

- Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
- Sub Bidang Pengolahan Data

Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Berdasarkan Perda Nomor: 11 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Gambar I.1
Struktur Organisasi BKD Kota Bukittinggi





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi merupakan langkah awal mewujudkan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi tupoksi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Acuan bagi penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang merupakan penjabaran dari pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah terpilih. Didalam Renstra SKPD memuat program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah yaitu dalam bidang manajemen kepegawaian. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas di bidang manajemen kepegawaian, maka dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi tidak bisa lepas dari Renstra Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Dan selanjutnya Renstra ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi.

- Visi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah :



Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi yang Profesional dan Sejahtera

➤ Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur,
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian,
4. Meningkatkan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur.

➤ Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh BKD Kota Bukittinggi terkait dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah :

- 1) Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
- 2) Menciptakan SDM Aparatur yang memenuhi standar,
- 3) Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan sistem otomatisasi,
- 4) Mewujudkan aparatur yang inovatif, berprestasi dan bekinerja tinggi.

➤ Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah :

- 1) Penataan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien
- 2) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD
- 3) Peningkatan kompetensi SDM Aparatur
- 4) Penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi
- 5) Peningkatan manajemen administrasi kepegawaian
- 6) Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
- 7) Peningkatan Disiplin Aparatur

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi dipetakan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penataan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	Tertatanya manajemen penyelenggaraan pemerintahan	100	100	100	100	100
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	100	100	100	100	100
2	Menciptakan SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi	Peningkatan kompetensi SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti diklat (orang)	500	500	500	500	500
		Penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi	Persentase jabatan yang diisi sesuai standar kompetensi (%)	60	70	80	85	90
3	Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan sistem otomisasi	Peningkatan manajemen administrasi kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dikelola dengan sistem otomisasi (kegiatan)	1	3	5	7	7
4	Mewujudkan aparatur yang inovatif, berprestasi dan berkinerja tinggi	Peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai	Jumlah pegawai yang menerima reward (orang)	500	1000	1500	2000	2500
		Peningkatan disiplin aparatur	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin	100	100	100	100	100

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

B. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi menyusun penetapan kinerja tahun 2016 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2020. Target capaian kinerja tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Kota Bukittinggi Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Penataan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	Tertatanya manajemen penyelenggaraan pemerintahan	100%
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	100%
3	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Diklat	500 Orang
4	Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi	Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Standar Kompetensi	60%
5	Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Dikelola dengan Sistem Otomatisasi	1 Kegiatan
6	Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward	500 Orang
7	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	100

Dalam pelaksanaan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut, didukung dengan program dan kegiatan dengan uraian alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.3.**Program dan Pagu Anggaran Tahun 2016**

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	521,279,135
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128,110,000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	21.070.000
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.078.280
5	Program Pendidikan Kedinasan	1.390.065.205
6	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	983.608.220
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	955.342.300
8	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	797.735.100
9	Program Pembinaan dan Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	1.513.065.100
	Jumlah	6.317.353.340



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi-misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk perjanjian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016. Pengukuran kinerja dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2016.

Akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 dilihat dari capaian kinerja setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai setelah pelaksanaan kegiatan, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi ditentukan sasaran strategis berikut :

- ✓ **Sasaran I** : Penataan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien,
- ✓ **Sasaran II** : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD
- ✓ **Sasaran III** : Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur,
- ✓ **Sasaran IV** : Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi,
- ✓ **Sasaran V** : Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian,
- ✓ **Sasaran VI** : Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai.
- ✓ **Sasaran VII** : Peningkatan Disiplin Aparatur.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada organisasi. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara kinerja dan target yang diperjanjikan dalam penetapan atau perjanjian kinerja.

Hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun Anggaran 2016, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penataan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	Tertatanya manajemen penyelenggaraan pemerintahan	100%	95,31%	95,31%
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	100%	100%	100%
3	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Diklat	500 Orang	426 Orang	85%
4	Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi	Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Standar Kompetensi	60%	131,03%	218%
5	Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Dikelola dengan Sistem Otomatisasi	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200%
6	Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward	500 Orang	1.376 Orang	275%
7	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	100%	26%	26%

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2020 dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis yang hendak dicapai. Pencapaian Kinerja dari masing-masing sasaran strategis beserta indikator keberhasilan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis



**Penataan Manajemen
Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Bersih, Efektif dan Efisien**

Sasaran Strategis dari “Penataan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien” di ukur dengan indikator “Tertatanya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan”, yang dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yaitu : Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Sasaran ini merupakan program dan kegiatan rutin perkantoran guna mendukung kelancaraan operasional SKPD yang diharapkan dapat mendukung tujuan dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi.

Sasaran ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran dengan target 100% dan dilaksanakan melalui 12 kegiatan, yaitu : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Jasa Kebersihan Kantor, Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Peggandaan, Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke luar Kota Bukittinggi, Jasa Pegawai Non PNS dan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sedangkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan indikator kinerja Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur, diwujudkan dengan 4 kegiatan, yaitu : Pengadaan Perlengkapan Kantor, Peralatan Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dan Rehab Ringan Gedung Kantor

Untuk melakukan penilaian capaian kinerja sasaran “Penataan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien”, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penataan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	Tertatanya manajemen penyelenggaraan pemerintahan	100%	95,31%	95,31%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran Tertatanya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan target 100% hanya dapat terealisasi sebesar 95,31% sehingga capaian kerjanya adalah 95,31%.

Tidak terpenuhinya target pada sasaran ini sebesar 100% dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada tahun berjalan dan kebutuhan baik pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran maupun Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Untuk menganalisis capaian kinerja dari sasaran “Penataan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien”, adalah dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
		2016	2015
Penataan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	Tertatanya manajemen penyelenggaraan pemerintahan	95,31%	95,36%

Berdasarkan perbandingan tabel di atas, terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 0,05% dari tahun 2015 sebesar 95,36% menjadi 95,31% pada tahun 2016. Penurunan capaian kinerja tersebut antara lain kegiatan yang dilaksanakan bersifat rutin dan insidental sesuai kebutuhan atau kondisi yang terjadi. Misalnya pada kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai dengan kondisi kerusakan peralatan atau perlengkapan kantor, sehingga bila tidak ada kerusakan maka tidak dilakukan perbaikan, dari target kerusakan terhadap peralatan/perlengkapan tidak seluruhnya terealisasi.

Sasaran Strategis



Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD

Sasaran Strategis dari “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD” di ukur dengan indikator “Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang diwujudkan melalui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator % laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu dengan kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran,

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD,
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
4. Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2015-2020.

Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan indikator Tersusunnya Laporan Akuntabilitas SKPD dapat diwujudkan sesuai target sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran dari Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SPKPD, dapat terpenuhi atau terealisasi sesuai dengan target yaitu 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 terkait dengan pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sangat baik.

Sedangkan untuk menganalisis capaian kinerja sasaran dan indikator sasaran ini adalah dengan membandingkan capaian kinerja dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu :

Tabel 3.5.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
		2016	2015
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	100%	100%

Dari hasil analisis capaian kinerja pada tabel di atas, terlihat bahwa kinerja Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 tidak mengalami perubahan dibanding kinerja pada tahun 2015.

Pencapaian kinerja sebesar 100% ini didukung dengan kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan target 7 laporan, dapat direalisasikan 7 laporan sehingga capaian kinerja 100%,
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD, dari target 6 dokumen tercapai 100%,
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target sebanyak 3 dokumen dapat direalisasikan 100%,
4. Penyusunan Renstra SKPD, target 1 dokumen Renstra dapat direalisasikan.

Sasaran Strategis



**Peningkatan Kompetensi SDM
Aparatur**

Sasaran Strategis dari “Peningkatan Kompetensi Aparatur” di ukur dengan indikator “Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Diklat”, yang dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yaitu : Pendidikan Kedinasan dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Tahun 2016 merupakan tahun transisi dari berakhirnya Renstra SKPD 2010-2015 dan memasuki periode Renstra 2016-2020, namun demikian penempatan program dan kegiatan yang tertera pada anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 masih mengacu pada Renstra pada tahun 2010-2015.

Penilaian capaian kinerja sasaran dan indikator sasaran dari Peningkatan Kompetensi Aparatur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Diklat	500 Orang	426 Orang	85,2%

Sesuai tabel di atas diketahui bahwa Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Diklat, dengan target 500 orang hanya dapat terealisasi sebanyak 426 orang atau tingkat capaian sebesar 85,2%. Tidak tercapainya target dari jumlah aparatur yang mengikuti Diklat antara lain, keterbatasan dana untuk mengikuti diklat, perubahan regulasi terkait pelaksanaan diklat dan tidak ada permintaan untuk penyelenggaraan diklat dari SKPD.

Dalam penyusunan Renstra 2016-2020 telah ditetapkan indikator sasaran Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur yaitu Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Diklat dengan target 500 orang, Untuk mencapai target dari sasaran ini didukung dengan Program berikut :

1. Pendidikan Kedinasan,
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

Sedangkan perbandingan tingkat capaian kinerja dari sasaran Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur yang diukur dengan indikator sasaran “Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Diklat”, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.**Analisis Capaian Kinerja Sasaran**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
		2016	2015
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Diklat	85,2%	115%

Dari tabel di atas, terdapat penurunan capaian kinerja dari tahun 2015 sebesar 115% menjadi 85,2% pada tahun 2016. Rendahnya pencapaian kinerja tersebut antara lain dikarenakan keterbatasan dana untuk pelaksanaan diklat, perubahan regulasi terkait pengiriman atau pelaksanaan diklat dan dari sejumlah diklat yang direncanakan akan diikuti oleh ASN tidak semuanya dapat dipenuhi atau dilaksanakan.

Pada Program Pendidikan Kedinasan yaitu Kegiatan Pengiriman Diklat Pim Tk. II dan III dari rencana 2 orang hanya dapat terealisasi 1 orang, sedangkan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis dari semula 300 orang yang terealisasi sebanyak 297 orang.

Demikian juga pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai BKD, dari 12 orang yang direncanakan untuk mengikut diklat hanya terealisasi sebanyak 6 orang.

Kedepan tentu perlu dievaluasi kembali baik dari segi jenis diklat, jumlah peserta maupun penganggaran yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur.

Sasaran Strategis



**Penempatan Dalam Jabatan
sesuai dengan Standar
Kompetensi**

Sasaran Strategis dari “Penempatan Dalam Jabatan sesuai Standar Kompetensi” di ukur dengan indikator “Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Standar Kompetensi”, dengan gambaran pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi	Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Standar Kompetensi	60%	131,03%	218,38%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dengan indikator sasaran Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Standar Kompetensi, dari target 60% dapat terealisasi sebesar 131,03% sehingga tingkat capaiannya sebesar 218,38%.

Sasaran Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi ini dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 10 kegiatan.

Untuk menganalisis capaian kinerja sasaran ini terlebih dahulu kita lihat perbandingan pada tabel berikut :

Tabel 3.9.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
		2016	2015
Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi	Persentase Jabatan yang Diisi sesuai dengan Standar Kompetensi	218,38%	89%

Sesuai dengan tabel di atas, terdapat kenaikan capaian kinerja dari tahun 2015 sebesar 89% menjadi sebesar 218,38% pada tahun 2016.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tahun 2016 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang penyusunan dan penetapannya baru dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 sehingga penempatan program dan kegiatan masih masih mengacu pada Renstra 2010-2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sasaran Penempatan Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pengurusan KARIS/KARSU dan KARPEG, Fasilitasi Pengurusan KPE, Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG, Pengembangan dan Pemeliharaan SAPK dan Tindak Lanjut PUPNS.

Namun dengan adanya kegiatan tersebut maka capaian kinerja sasaran ini dapat terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis		Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian
--------------------------	---	---

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis “Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian” sebagaimana dinyatakan di atas, di ukur dengan indikator “Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Dikelola dengan Sistem Otomatisasi”, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.10.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Dikelola dengan Sistem Otomatisasi	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dikelola dengan Sistem Otomatisasi, di targetkan 1 Kegiatan dapat terealisasi sebesar 2 kegiatan sehingga didapat tingkat capaian sebesar 200%.

Terkait dengan masa transisi dari berakhirnya Renstra Tahun 2010-2015 ke penyusunan Renstra Tahun 2016-2020 kiranya masih perlu penyesuaian terhadap penetapan program dan kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan pada tahun 2016 masih mengacu pada Renstra 2010-2015.

Termasuk sasaran Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian, dimana dengan indikator Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Dikelola dengan Sistem Otomatisasi, seharusnya meliputi kegiatan

Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pengurusan KARIS/KARSU dan KARPEG, Fasilitasi Pengurusan KPE, Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG, Pengembangan dan Pemeliharaan SAPK dan Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun.

Namun pada tahun 2016 sasaran dengan indikator ini meliputi Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS dengan 2 kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun, dan
2. Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS.

Untuk menganalisis capaian kinerja sasaran Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian diukur berdasarkan capaian kinerja indikator sasaran, yaitu Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dikelola dengan Sistem Otomatisasi, perlu kiranya dilakukan perbandingan tingkat capaian dengan tahun sebelumnya, yaitu :

Tabel 3.11.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
		2016	2015
Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Dikelola dengan Sistem Otomatisasi	200%	-

Berdasarkan tabel di atas, dikarenakan tahun 2016 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 sehingga untuk indikator jumlah kegiatan pelayanan kepegawaian yang dikelola dengan sistem otomisasi belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Perlu digaris bawahi, terkait dengan transisi perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi, penyusunan program/kegiatan dan penganggaran pada tahun 2016 masih mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2010-2015, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan berbeda penempatannya.

Namun dalam hal pencapaian kinerja program dan kegiatan pada sasaran ini dikategorikan Sangat Baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun, dengan indikator Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan, dari target 90 orang yang diurus SK pensiunnya dapat direalisasikan sebanyak 112 SK, dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini mencapai 124%,
2. Kegiatan Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS, indikator kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang Mengikuti Pembekalan Purna Tugas, ditargetkan sebanyak 80 orang PNS yang akan memasuki purna tugas mengikuti pembekalan, namun terealisasi 71 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 89%, hal ini dikarenakan sesuatu hal dan alasan pribadi sehingga 9 PNS yang akan memasuki masa purna tugas tidak dapat ikut pembekalan,
3. Secara rata-rata dari 2 kegiatan ini capaian kinerjanya mencapai 106,6%.

Sasaran Strategis



Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai

Sasaran Strategis dari Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai diukur dengan indikator “Jumlah Pegawai yang Menerima Reward dan Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin”, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward	500 Orang	1.376 Orang	275,2%
	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	100%	76%	76%

Dari tabel di atas, pada indikator Jumlah Pegawai yang Menerima Reward, pada tahun 2016 di targetkan 500 orang dengan realisasi 1376 orang sehingga didapat tingkat capaian sebesar 275,2 %. Pencapaian ini berasal kegiatan berikut :

1. Peningkatan Kesejahteraan PNS, dari target 35 Orang ASN Golongan I dan II yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan dapat terealisasi 100%,
2. Peningkatan Kesejahteraan Non PNS, dengan indikator Jumlah Non PNS yang diberi Tunjangan Kesejahteraan yaitu sebanyak 945 Orang dapat direalisasikan seluruhnya,
3. Pemberian Pesangon (Uang Lepas) dan Tunjangan Kematian bagi Pekerja Harian, target pada kegiatan ini sebanyak 15 Orang namun terealisasi sebanyak 7 Orang,
4. Pengurusan Satya Lencana Karya Satya, kegiatan ini ditargetkan sebanyak 400 dokumen Satya Lencana Karya Satya yang akan diserahkan kepada ASN Kota Bukittinggi namun hanya dapat terealisasi sebanyak 389 dokumen,
5. Penilaian Pegawai Berprestasi, dari target 15 Orang Pegawai Berprestasi realisasinya adalah 0.

Sedangkan pada Indikator berikutnya yaitu : Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin, dengan target 100% terealisasi sebesar 76% sehingga capaian kinerja adalah 76%.

Tidak tercapainya target Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin, bukan berarti rendahnya kinerja sasaran Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, karena rata-rata capaian dari sasaran ini adalah sebesar 175,56%.

Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin, pada tahun anggaran 2016 dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Penunjang Kegiatan Sidang MPP,
2. Pengawasan Disiplin dan Pembinaan,
3. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling.

Sedangkan untuk menganalisis sasaran Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai yang memiliki 2 indikator sasaran sebagai alat ukurnya yaitu : Jumlah Pegawai yang Menerima Reward dan Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
		2016	2015
Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menerima Reward	275,2%	85,2%
	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	76%	86%

Dari tabel di atas dapat dilihat terkait Jumlah Pegawai yang Menerima Reward, terdapat kenaikan capaian kinerja dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pada Tahun 2015 capaian kinerja Jumlah Pegawai yang Menerima Reward sebesar 85,2% dan tahun 2016 menjadi 275,2%.

Meningkatnya capaian kinerja pada Jumlah Pegawai yang Menerima Reward didukung dengan kegiatan :

1. Peningkatan Kesejahteraan PNS, indikator kegiatan ini adalah Jumlah ASN Golongan I dan II yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan, dari target 35 Orang dapat terealisasi 100%, dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan memunculkan ASN yang memiliki jiwa kewirausahaan,
2. Peningkatan Kesejahteraan Non PNS, dengan indikator Jumlah Non PNS yang diberi Tunjangan Kesejahteraan, target yang ditetapkan sebanyak 945 orang dan realisasinya sebesar 100%,
3. Pemberian Pesangon (Uang Lepas) dan Tunjangan Kematian bagi Pekerja Harian, indikator yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Jumlah Pekerja Harian yang menerima Pesangon (Uang Lepas) dan Tunjangan Kematian, dengan target 15 orang namun yang terealisasi sebanyak 7 orang, hal ini karena kegiatan ini bersifat insidental yang merupakan bantuan bagi Pekerja Harian sebagai tali asih dalam membantu mengurangi kesulitan mereka.

4. Pengurusan Satya Lencana Karya Satya, indikatornya adalah Jumlah Dokumen Satya Lencana Karya Satya, target yang ditetapkan sebanyak 400 dokumen hanya dapat terealisasi 389 dokumen Satya Lencana Karya Satya, hal ini karena dari dokumen yang diusulkan sebanyak 11 dokumen belum lolos dalam pemberian penghargaan,
5. Penilaian Pegawai Berprestasi, indikator kegiatan ini berupa Jumlah PNS Berprestasi yang diberi Reward, target kegiatan ini semula adalah 15 Orang namun tidak dapat direalisasikan atau 0%, hal ini dikarenakan kegiatan pemilihan pegawai berprestasi untuk tahun ini ditunda,

Sedangkan pada indikator Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin terjadi penurunan capaian kinerja, dimana pada tahun 2015 capaian kinerja sebesar 86% sedangkan tahun 2016 sebesar 76%. Penurunan ini bukan berarti rendahnya kinerja aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi, karena dari 3 kegiatan yang dilaksanakan semua telah terlaksana.

Penunjang Kegiatan Sidang MPP, dari target 12 Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin, yang dapat terealisasi sebanyak 10 Rekomendasi, hal ini dikarenakan proses penyelesaian kasus hingga terbitnya Rekomendasi membutuhkan waktu yang hingga akhir tahun 2016 belum dapat diselesaikan dan direncanakan dilanjutkan pada tahun 2017.

Pada kegiatan Pengawasan Disiplin dan Pembinaan dengan indikator Frekuensi Pelaksanaan Sidak Kehadiran ASN, dari target pelaksanaan 9 kali hanya dapat terealisasi 4 kali dikarenakan belum ada instruksi lebih lanjut untuk melakukan sidak, sehingga capaian kinerja sebesar 44%.

Sedangkan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling yang memiliki indikator Rekomendasi Psikologis dan Surat Keterangan telah mengikuti Konseling Pra Nikah dan Kasus Kepegawaian bagi ASN Kota Bukittinggi dapat terlaksana 100%.

Diharapkan dengan terlaksana dan meningkatnya capaian kinerja dari sasaran Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, dapat tercapai maksud dari tujuan yaitu Mendorong Aparatur untuk Berinovasi, Berprestasi dan Berkinerja Tinggi.

C. Realisasi Anggaran

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja organisasi yang baik tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran dan untuk pencapaian kinerja dimaksud disajikan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan sasaran dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan.

Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp.6.317.353.340,-** (Enam milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp.5.365.702.090,-** (Lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu sembilan puluh rupiah) atau 84,94%. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.14.

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3
I.	Pelayanan Administrasi perkantoran	521,279,135	463,904,050	88.99%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,437,000	2,307,000	94.67%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,600,000	13,279,898	80.00%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	121,802,800	95,120,450	78.09%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3,239,200	3,092,000	95.46%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5,000,000	2,360,000	47.20%
6	Penyediaan alat tulis kantor	13,619,600	13,024,300	95.63%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,000,000	11,896,960	99.14%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,680,700	2,583,900	96.39%
9	Penyediaan makanan dan minuman	9,500,000	7,757,000	81.65%
10	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	260,000,000	239,003,014	91.92%
11	Penyediaan jasa pegawai non PNS	70,739,235	70,689,528	99.93%
12	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	3,660,600	2,790,000	76.22%
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128,110,000	119,405,000	93.21%
1	Pengadaan Perlengkapan kantor	12,800,000	12,779,500	99.84%
2	Pengadaan Peralatan Kantor	87,810,000	85,241,500	97.07%
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7,500,000	1,634,000	21.79%
4	Rehab Ringan Gedung Kantor	20,000,000	19,750,000	98.75%
III.	Peningkatan Disiplin Aparatur	21,070,000	21,070,000	100.00%
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	21,070,000	21,070,000	100.00%
IV.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,078,280	6,786,160	95.87%
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1,574,190	1,574,190	100.00%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	1,500,000	1,403,880	93.59%
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1,454,090	1,454,090	100.00%
4	Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2015-2020	2,550,000	2,354,000	92.31%
V.	Program Pendidikan Kedinasan	1,390,065,205	1,286,732,088	92.57%
1	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III	62,060,000	13,678,500	22.04%
2	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	455,615,555	412,245,295	90.48%
3	Kegiatan Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV	813,345,600	807,399,750	99.27%
4	Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi	59,044,050	53,408,543	90.46%
VI.	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	983,608,220	651,632,741	66.25%
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	580,882,500	402,358,497	69.27%
2	Penyusunan Formasi PNS	59,120,945	45,504,091	76.97%
3	Kegiatan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS dan Pelaksanaan Sumpah Janji	6,811,400	6,037,040	88.63%
4	Kegiatan Implementasi dan Evaluasi Program Peningkatan SDM Aparatur	28,250,675	24,142,865	85.46%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3
5	Kegiatan Penyelenggaraan Psikotest PNS	9,901,900	6,558,150	66.23%
6	Kegiatan Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	47,515,000	20,872,570	43.93%
7	Peningkatan Kompetensi pegawai BKD	60,400,000	50,716,441	83.97%
8	Evaluasi Bakat Minat Pejabat Fungsional Tertentu dan Tenaga Operasional Lapangan	13,570,100	2,985,750	22.00%
9	Pengangkatan dan Pengurusan NIP CPNS Tenaga Kesehatan dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kota Bukittinggi	50,588,500	0	0.00%
10	Pembekalan dan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	126,567,200	92,457,337	73.05%
VII.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	955,342,300	663,878,784	69.49%
1	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	132,501,000	123,677,328	93.34%
2	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	278,154,500	271,914,127	97.76%
3	Kegiatan Pengurusan KARIS, KARSU dan KARPEG PNS	26,500,000	22,352,800	84.35%
4	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	120,678,100	105,449,051	87.38%
5	Kegiatan Pelaksanaan Proses Baperjakat Struktural dan Tindak Lanjut	104,040,600	51,282,728	49.29%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3
6	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Kartu Elektronik (KPE)	27,740,300	18,946,250	68.30%
7	Kegiatan Penelusuran Bakat dan Minat PNS	12,214,500	6,526,620	53.43%
8	Tindak Lanjut PUPNS	37,091,800	27,952,100	75.36%
9	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	171,311,500	24,305,380	14.19%
10	Pengurusan dan Pemberkasan Pengalihan PNS Kota Bukittinggi menjadi PNS Pusat dan PNS Provinsi	45,110,000	11,472,400	25.43%
VIII.	Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	1,513,065,100	1,370,266,795	90.56%
1	Kegiatan Peningkatan kesejahteraan PNS	325,000,000	317,769,920	97.78%
2	Kegiatan Peningkatan kesejahteraan Non PNS	816,481,000	815,888,220	99.93%
3	Kegiatan Penunjang Kegiatan Sidang MPP	48,823,700	40,016,420	81.96%
4	Kegiatan Pengawasan Disiplin dan Pembinaan PNS	26,095,700	9,369,865	35.91%
5	Kegiatan Pemberian Pesangon (Uang Lepas) dan Tunjangan Kematian bagi Pekerja Harian	200,859,600	108,182,200	53.86%
6	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	46,559,300	34,790,910	74.72%
7	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	34,000,000	29,003,460	85.30%
8	Penilaian Pegawai Berprestasi	15,245,800	15,245,800	100.00%
IX.	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	797,735,100	782,026,472	98.03%
1	Pengelolaan dan	79,147,300	75,363,362	95.22%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3
	Pengurusan Pensiun			
2	Pembekalan persiapan purna tugas PNS	718,587,800	706,663,110	98.34%
		6,317,353,340	5,365,702,090	84.94%

Pencapaian realisasi anggaran sebesar 84,94% ini disebabkan antara lain : regulasi, kebijakan, hal-hal tidak terduga dan efisiensi anggaran.

Perbandingan realisasi anggaran dengan tahun sebelumnya atau akhir masa pelaksanaan Renstra 2010-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Kegiatan Belanja Langsung

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)
1	2015	6,335,982,500	5,350,069,309	84%
2	2016	6,317,353,340	5,365,702,090	84.94%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah selama Tahun Anggaran 2016 yang merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Tahun 2016-2020,

Laporan Kinerja ini diawali dengan penjabaran visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi, sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya dan realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud. Berdasarkan penilaian secara umum terhadap keseluruhan sasaran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam indikator kinerja utamanya dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan dan penjabaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi secara umum pada Tahun 2016 adalah sebesar 90%, artinya kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi dapat dikategorikan baik.
2. Penjabaran terhadap capaian dari masing-masing indikator kinerja dari sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - ✓ **Sasaran I** : Penataan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien,
 - ✓ **Sasaran II** : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD
 - ✓ **Sasaran III** : Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur,
 - ✓ **Sasaran IV** : Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi,
 - ✓ **Sasaran V** : Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian,
 - ✓ **Sasaran VI** : Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai.
 - ✓ **Sasaran VII** : Peningkatan Disiplin Aparatur.

3. Adapun realisasi anggaran yang dapat diserap oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 84,94%.
4. Secara umum dapat dikatakan bahwa target yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi selama pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis tahun 2016-2021 dapat dicapai dengan baik.
5. Kedepannya perlu adanya inovasi dan langkah kebijakan yang ditempuh, konsistensi dan komitmen seluruh aparatur dan unsur SKPD dalam upaya peningkatan pendayagunaan sumber daya secara optimal sesuai dengan fungsi dan manfaatnya agar memperoleh capaian kinerja yang lebih baik.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penataan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	Tertatanya manajemen penyelenggaraan pemerintahan (%)	100	92,71	93%
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	100	100	100%
3	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti diklat (orang)	500	426	85%
4	Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi	Persentase jabatan yang diisi sesuai standar kompetensi (%)	60	131,03	218%
5	Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola dengan sistem otomatisasi (kegiatan)	1	2	200%
6	Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah pegawai yang menerima reward (orang)	500	1.376	275%
7	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin (%)	100	26	26%
			165,8571429	280,1470725	115%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2016

Tujuan	Sasaran	Program	KEGIATAN					Capaian (%)	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
			Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13=12/11
1 Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Penataan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian Buku cek (), Jumlah pembelian Materai 3000 (), Jumlah pembelian Materai 6000 (), Ketersediaan biaya pengiriman surat-surat dinas ()	Buah	Surat Menyurat BKD	Surat Menyurat BKD	100%	85,42%	2.437.000	2.307.000	94,67%
			1,2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan telepon (), pembayaran tagihan listrik ()	Bulan	2 Rekening Telepon, 3 Rekening Listrik	2 Rekening Telepon, 3 Rekening Listrik	100%		16.600.000	13.279.898	80,00%
			1,3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0		0	0	0,00%
			1,4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya (), Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	3 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	100%		121.802.800	95.120.450	78,09%
			1,5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis Peralatan kebersihan kantor yang disediakan ()	Item	20 Item	20 Item	100%		3.239.200	3.092.000	95,46%
			1,6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor ()	Unit	20 Computer, 12 Laptop, 4 Mesin Tik, 2 Infocus, 1 Camera Digital, 1 Organ, 1 Handycam, 1 AC, 1 SoundSystem, 12 Printer	1 Computer, 2 Laptop, 2 Mesin Tik, 4 Printer	25%		5.000.000	2.360.000	47,20%
			1,7 Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat tulis kantor yang disediakan ()	Item	50 Item	50 Item	100%		13.619.600	13.024.300	95,63%

Tujuan	Sasaran	Program	KEGIATAN					Capaian (%)	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
			Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13=12/11
			1,8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang cetakan yang disediakan (), Ketersediaan biaya Penggandaan dokumen dan surat-surat dinas ()	Item	8 Item	8 Item	100%		12.000.000	11.896.960	99,14%
			1,9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan ()	Item	13 Item	13 Item	100%		2.680.700	2.583.900	96,39%
			1,10 Penyediaan makanan dan minuman	Persentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya ()	%	100 Bungkus, 1 Tahun, 12 Bulan	100 Bungkus, 1 Tahun, 12 Bulan	100%		9.500.000	7.757.000	81,65%
			1,11 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase Rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas keluar kota Bukittinggi yang diikuti ()	%	1 Tahun	1 Tahun	100%		260.000.000	239.003.014	91,92%
			1,12 Penyediaan jasa pegawai non PNS	Jumlah petugas kebersihan di Pusido yang dibayarkan iuran BPJSnya (), Jumlah petugas kebersihan di Pusido yang dibayarkan jasanya ()	Orang	3 Orang	3 Orang	100%		70.739.235	70.689.528	99,93%
			1,13 Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan yang dibayarkan honorinya ()	Orang	3 Paket	3 Paket	100%		3.660.600	2.790.000	76,22%
		2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,1 Pengadaan Perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan ()	Unit	1 Paket Foto, 1 Kursi Kerja Eselon II dan 5 Kursi Kerja Eselon III	1 Paket Foto, 1 Kursi Kerja Eselon II dan 5 Kursi Kerja Eselon III	100%		12.800.000	12.779.500	99,84%

Tujuan	Sasaran	Program	KEGIATAN					Capaian (%)	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran (%)		
			Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13=12/11		
2 Menciptakan SDM Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,2 Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan ()	Unit	6 Mouse, 3 Unit AC, 1 Unit Televisi, 1 Tangga Alumunium, 1 Handycam, 6 Laptop, 2 Monitor, 6 Printer, 2 Scanner, 1 Hardisk Eksternal, Peralatan Komputer Jaringan	6 Mouse, 1 Tangga Alumunium, 1 Handycam, 1 CCTV, 6 Laptop, 2 Monitor, 6 Printer, 1 Hardisk Eksternal	100%	100,00%	87.810.000	85.241.500	97,07%		
			2,3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Pusido yang dipelihara ()	%	1 Paket	1 Paket	100%		7.500.000	1.634.000	21,79%		
			2,4 Penyusunan DED Pembangunan Kantor BKD	Dokumen DED pembangunan kantor BKD ()				0%		0	0	0,00%		
			2,5 Rehab Ringan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang di rehab	Ruangan	1 Ruangan	1 Ruangan	100%		20.000.000	19.750.000	98,75%		
			1,1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan persemester yang disampaikan tepat waktu ()	Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%		1.574.190	1.574.190	100,00%		
		1,2 Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen renja dan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu ()	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	1.500.000	1.403.880	93,59%				
		1,3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar SKPD yang disampaikan tepat waktu ()	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1.454.090	1.454.090	100,00%				
		1,4 Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2015-2020	Dokumen Renstra BKD Tahun 2016-2020 ()	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2.550.000	2.354.000	92,31%				
				1 Program Pendidikan Kedinasan	1,1 Pengiriman PNS mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III	Jumlah ASN Kota Bukittinggi yang mengikuti Diklat Pim Tk. II, Pim Tk. III	Orang	2	1	50%		62.060.000	13.678.500,00	22,04%

Tujuan	Sasaran	Program	KEGIATAN					Capaian (%)	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
			Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13=12/11
		2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,2 Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Orang	300	297	99%	68,50%	455.615.555	412.245.295	90,48%
			1,3 Pelaksanaan Diklat Pim. Tk. IV	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim Tk. IV	Orang	32	32	100%		813.345.600	807.399.750	99,27%
			1,4 Seleksi Calon Taruma STTD Tingkat Kota Bukittinggi	Jumlah Taruna STTD utusan Kota Bukittinggi	Orang	4	1	25%		59.044.050	53.408.543	90,46%
			2,1 Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	Jumlah ASN Kota Bukittinggi yang mengikuti Pendidikan Formal yang mendapat bantuan	Orang	60	89	148%	81,83%	580.882.500	402.358.497,00	69,27%
			2,2 Peyusunan Formasi PNS	Dokumen Formasi PNS	Dokumen	1	1	100%		59.120.945	45.504.091	76,97%
			2,3 Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Pelaksanaan Sumpah Janji	Jumlah Pelaksanaan Sumpah Janji	Kegiatan	1	1	100%		6.811.400	6.037.040	88,63%
			2,4 Implementasi dan Evaluasi Program Peningkatan SDM Aparatur	Dokumen Evaluasi Diklat	Eksemplar	4	4	100%		28.250.675	24.142.865	85,46%
			2,5 Penyelenggaraan Psikotest PNS	Jumlah ASN yang Mengikuti Psikotest	Orang	120	33	28%		9.901.900	6.558.150	66,23%
			2,6 Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	Proses Surat Keputusan Jabatan Fungsional Tertentu	SK	5	10	200%		47.515.000	20.872.570	43,93%
			2,7 Peningkatan Kompetensi Pegawai BKD	Jumlah Pegawai BKD yang Difasilitasi Mengikuti Diklat	Orang	12	6	50%		60.400.000	50.716.441	83,97%
			2,8 Evaluasi Bakat Minat Pejabat Fungsional Tertentu dari Tenaga Operasional Lapangan	Jumlah Pejabat yang di Evaluasi	Orang	100	0	0%		13.570.100	2.985.750	22,00%
			2,9 Pengangkatan dan Pengurusan NIP CPNS Tenaga Kesehatan dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kota Bukittinggi	Jumlah CPNS Tenaga Kesehatan dan PTT yang diangkat dan diurus NIP CPNSnya	Orang	30	0	0%		50.588.500	0	0,00%
			2,10. Pembekalan dan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah Peserta Pembekalan dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Orang	120	111	93%		126.567.200	92.457.337	73,05%

Tujuan	Sasaran	Program	KEGIATAN					Capaian (%)	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
			Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13=12/11
	2 Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi	1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,1 Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	SK	1.000	500	50%	131,03%	132.501.000	123.677.328,00	93,34%
			1,2 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	Frekuensi Updating Data SIMPEG	Bulan	12	12	100%		278.154.500	271.914.127	97,76%
			1,3 Pengurusan KARIS, KARSU dan KARPEG PNS	Jumlah KARIS, KARSU dan KARPEG yang diterbitkan	Dokumen	150	150	100%		26.500.000	22.352.800	84,35%
			1,4 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Frekuensi Updating Data SAPK	Bulan	12	12	100%		120.678.100	105.449.051	87,38%
			1,5 Pelaksanaan Proses Baperjakat Struktural dan Tindak Lanjut	Rekomendasi untuk ASN yang Naik Pangkat/Menduduki Jabatan	Rekomendasi	10	8	80%		104.040.600	51.282.728	49,29%
			1,6 Fasilitasi Pembuatan Kartu Elektronik (KPE)	Jumlah KPE yang diterbitkan	KPE	50	305	610%		27.740.300	18.946.250	68,30%
			1,7 Penelusuran Bakat dan Minat PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Penelusuran Bakat dan Minat	Orang	100	98	98%		12.214.500	6.526.620	53,43%
			1,8 Tindak Lanjut PUPNS	Jumlah Data PUPNS yang Divalidasi	File	3.976	3.107	78%		37.091.800	27.952.100	75,36%
			1,9 Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	Dokumen Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	Dokumen	6	0	0%		171.311.500	24.305.380	14,19%
			1.10. Pengurusan dan Pemberkasan Pengalihan PNS Kota Bukittinggi menjadi PNS Pusat dan PNS Provinsi	Jumlah PNS yang dialihkan statusnya menjadi PNS Pusat dan PNS Provinsi	Orang	701	660	94%		45.110.000	11.472.400	25,43%
3 Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Sistem Otomisasi	1 Peningkatan Manajemen Administrasi Kepegawaian	1 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	1,1 Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan	Orang	90	112	124%	106,60%	79.147.300	75.363.362	95,22%
			1,2 Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	Jumlah PNS yang Mengikuti Pembekalan Purna Tugas	Orang	80	71	89%		718.587.800	706.663.110	98,34%

Tujuan	Sasaran	Program	KEGIATAN					Capaian (%)	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
			Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12	13=12/11
4 Mewujudkan Aparatur yang Inovatif, Berprestasi dan Berkinerja Tinggi	1 Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	1 Program Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	1,1 Peningkatan Kesejahteraan PNS	Jumlah ASN Gol. I dan II yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	Orang	35	35	100%	71,46%	325.000.000	317.769.920	97,78%
			1,2 Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	Jumlah Non PNS yang diberi Tunjangan Kesejahteraan	Orang	945	945	100%		816.481.000	815.888.220	99,93%
			1,3 Penunjang Kegiatan Sidang MPP	Jumlah Rekomendasi/Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin	Rekomendasi	12	10	83%		48.823.700	40.016.420	81,96%
			1,4 Pengawasan Disiplin dan Pembinaan	Frekuensi Pelaksanaan Sidak Kehadiran ASN	Kali	9	4	44%		26.095.700	9.369.865	35,91%
			1,5 Pemberian Pesangon (Uang Lepas) dan Tunjangan Kematian bagi Pekerja Harian	Jumlah Pekerja Harian yang menerima Pesangon (Uang Lepas) dan Tunjangan Kematian	Orang	15	7	47%		200.859.600	108.182.200	53,86%
			1,6 Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Rekomendasi Psikologis dan Surat Keterangan telah Mengikuti Konseling Pra Nikah dan Kasus Kepegawaian bagi ASN Kota Bukittinggi	Bulan	12	12	100%		46.559.300	34.790.910	74,72%
			1,7 Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Dokumen SLKS yang diserahkan pada ASN	Dokumen	400	389	97%		34.000.000	29.003.460	85,30%
			1,8 Penilaian Pegawai Berprestasi	Jumlah PNS Berprestasi yang diberi Reward	Orang	15	0	0%		15.245.800	15.245.800	100,00%
		2 Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1,1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN BKD	Stel	49	49	100%	100,00%	21.070.000	21.070.000
										6.317.353.340	5.365.702.090	